KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

PETUNJUK PELAKSANAAN

KLINIK MODERNISASI PERTANIAN

PROGRAM ICARE














AGRO MODERN

icare
INTEGRATED CORPORATION OF AGRICULTURAL RESOURCE EMPOWERMENT

PETUNJUK PELAKSANAAN

KLINIK MODERNISASI PERTANIAN
PROGRAM ICARE

BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025

Petunjuk Pelaksanaan Klinik Modernisasi Pertanian Program ICARE

Pengarah	:	Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
Penyusun	:	

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, buku Petunjuk Pelaksanaan Klinik Modernisasi Pertanian pada *Project Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE) ini dapat diselesaikan.

Klinik Modernisasi Pertanian merupakan salah satu inovasi layanan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan terkait dalam mengembangkan rantai nilai komoditas pertanian secara terpadu. Klinik Modernisasi Pertanian mendekatkan inovasi BRMP kepada pengguna yang meliputi layanan konsultasi teknis, pendampingan, pengujian, penilaian kesesuaian, serta transfer teknologi tepat guna yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing sektor pertanian.

Pelaksanaan Klinik Modernisasi Pertanian pada Project ICARE tidak hanya menjadi wahana untuk mempercepat adopsi inovasi teknologi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun ekosistem pertanian modern yang berkelanjutan. Buku petunjuk pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pihak terkait, mulai dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, hingga evaluasi layanan klinik, agar kegiatan berjalan terarah, efektif, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sasaran.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, mitra kerja, dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku petunjuk pelaksanaan ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mengimplementasikan Klinik Modernisasi Pertanian, serta mendorong terwujudnya pertanian maju, mandiri, dan modern di berbagai wilayah Indonesia.

Bogor, Agustus 2025
Kepala Balai Besar,

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 1
1.3. Sasaran 1
1.4. Ruang Lingkup 2
BAB II. LANDASAN HUKUM DAN BATASAN PENGERTIAN 3
2.1. Landasan Hukum 3
2.2. Batasan Pengertian 4
BAB III. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN KLINIK MODERNISASI PERTANIAN 5
3.1. Waktu dan Tempat Klinik Modernisasi Pertanian 5
3.2. Target Sasaran Pelaksanaan 5
3.3. Jenis Klinik Modernisai Pertanian 5
3.4. Fasilitas Klinik Modernisasi Pertanian 6
3.5. Jenis Pelayanan Klinik Modernisasi Pertanian 6
3.6. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Detasir dari Unit Kerja Eseleon II 7
3.7. Mekanisme Penggunaan Anggaran 10
3.8. Mekanisme pengajuan anggaran 12
BAB IV. KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 13
4.1. Koordinasi 13
4.2. Monitoring dan Evaluasi 14
4.3. Pelaporan 15
BAB V. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KLINIK MODERNISASI PERTANIAN 17
5.1. Indikator Kinerja Klinik Modernisasi Pertanian 17
5.2. Strategi Unit Eselon II BRMP dalam Mencapai Target PDO 18
5.3. Target PDO Kegiatan Klinik Modernisasi Pertanian Tahun 2025 21
BAB IV. PENUTUP 22
LAMPIRAN-LAMPIRAN 23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dukungan Satuan Kerja BRMP dalam Kegiatan KMP 9
Tabel 2. Peran Lembaga yang Terlibat dalam Jaringan KMP 13
Tabel 3. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan KMP 15
Tabel 4. Strategi Unit Eselon UK dan Eselon II BRMP dalam Mencapai Target PDO 19
Tabel 5. Target PDO Kegiatan KMP Tahun 2025 21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Data Penerima Layanan 23
Lampiran 2. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan KMP 25
Lampiran 3. Format laporan berkala (bulanan) 26
Lampiran 4. Format laporan berkala (triwulan) 27
Lampiran 5. Format laporan berkala (tahunan) 28
Lampiran 6. Formulir Laporan Pelaksanaan Kegiatan 29
Lampiran 7. Formulir pertanggungjawaban keuangan 30

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi pertanian menuju sistem yang modern, efisien, dan berkelanjutan menjadi prioritas nasional dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Sejalan dengan hal tersebut, Project *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE) hadir sebagai program strategis untuk memperkuat kelembagaan petani dan mendorong penguatan rantai nilai komoditas pertanian. Salah satu komponen kunci dalam penguatan ini adalah penyediaan layanan teknis dan pendampingan berbasis kebutuhan nyata petani dan pelaku usaha tani di lapangan.

Dalam konteks penguatan rantai nilai komoditas pertanian di lokasi ICARE, terdapat kebutuhan akan sarana yang mampu menjembatani antara penghasil teknologi, kebijakan, dan praktik agribisnis di tingkat tapak. Menjawab kebutuhan tersebut, dibentuklah *Klinik Modernisasi Pertanian* (KMP) sebagai pusat layanan konsultasi, edukasi, teknologi, serta pendampingan bagi petani dalam mengadopsi teknologi. KMP dirancang untuk memberikan dukungan teknis secara langsung melalui penyediaan informasi, pengujian, dan penilaian kesesuaian teknologi serta inovasi modern dalam mendukung pengembangan usaha tani.

Klinik Modernisasi Pertanian berfungsi sebagai simpul interaksi antara Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), pemangku kepentingan kebijakan, serta petani dan pelaku usaha agribisnis. Melalui kehadiran tenaga detasir lapang yang terdiri dari penyuluh, perekayasa, teknisi, serta tenaga pendukung lainnya, KMP menjadi wadah kolaboratif dalam mengakselerasi adopsi teknologi modern guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian.

1.2. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk memberikan panduan operasional dan teknis dalam penyelenggaraan KMP di lokasi ICARE. Tujuannya adalah:

1. Menyediakan acuan pelaksanaan layanan konsultasi, edukasi, dan pengujian teknologi modern pertanian bagi petani dan pelaku rantai nilai komoditas.
2. Mendorong adopsi teknologi dan inovasi modern melalui pendekatan berbasis kebutuhan dan kondisi lokal.
3. Menguatkan kapasitas tenaga teknis lapang dalam memberikan layanan terpadu kepada petani dan pelaku usaha tani.
4. Menumbuhkan ekosistem pelayanan teknis yang terintegrasi dengan kelembagaan korporasi petani dan pelaku rantai nilai di kawasan ICARE.

1.3. Sasaran

Sasaran petunjuk pelaksanaan ini adalah berbagai pihak yang berperan dalam pengembangan dan penguatan rantai nilai komoditas pertanian di lokasi ICARE melalui penyelenggaraan Klinik Modernisasi Pertanian (KMP). Sasaran utama dari petunjuk pelaksanaan ini mencakup:

1. **Satuan kerja Eselon II lingkup BRMP** yang berperan sebagai penyedia sumber daya, teknologi, dan pembina teknis dalam implementasi KMP. Melalui sinergi lintas fungsi ini, diharapkan tercipta sistem pelayanan teknis yang responsif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan petani dan pelaku usaha tani.
2. **Tenaga teknis dan pendamping lapangan**, seperti penyuluh pertanian, tenaga medis dan paramedis veteriner, analis sistem dan teknologi aplikasi (ASTA), perekayasa, serta fasilitator lapangan. Mereka merupakan pelaksana teknis yang menjadi ujung tombak penyediaan layanan KMP di lapangan, serta menjadi agen perubahan dalam mendorong transformasi pertanian di kawasan ICARE.
3. **Petani anggota korporasi petani** yang menjadi penerima manfaat langsung dari layanan KMP. Melalui layanan ini, petani diharapkan memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi, konsultasi teknis, serta teknologi dan inovasi yang relevan dan aplikatif guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani mereka.
4. **Pelaku usaha dalam rantai nilai komoditas pertanian**, termasuk pengusaha pengolahan hasil, penyedia *input*, serta pelaku distribusi dan pemasaran. KMP menjadi sumber layanan pendukung yang strategis dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah komoditas melalui penerapan teknologi dan pendekatan agribisnis modern.

Dengan sasaran yang menyeluruh tersebut, KMP diharapkan mampu menjadi motor penggerak modernisasi pertanian yang inklusif dan berdampak nyata dalam mendukung keberhasilan program ICARE.

1.4. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan KMP ini memuat acuan terkait: (1) dasar hukum dan batasan pengertian dalam pelaksanaan kegiatan; (2) prosedur pelaksanaan kegiatan KMP; (3) mekanisme koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan (4) indikator kinerja kegiatan dan strategi pencapaian *project development objective* (PDO) pada KMP.

BAB II. LANDASAN HUKUM DAN BATASAN PENGERTIAN

Petunjuk Pelaksanaan Klinik Modernisasi Pertanian (KMP) disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nota kerjasama dengan pihak Bank Dunia yang relevan dengan pembangunan pertanian, kelembagaan petani, dan inovasi teknologi pertanian. Adapun landasan hukum yang menjadi acuan pelaksanaan KMP seperti pada bagian 2.1.

2.1. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menekankan pentingnya kemandirian dan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani;
3. Peraturan Presiden No 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yang menempatkan modernisasi pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Instrumen Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian No. 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.08/2022 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 760.1/Kpts/ RC.020/M/11/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/Rc.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
9. Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM)/Blue Book 2020-2024 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Publikasi Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) /Green Book 2021 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Loan Agreement Program Agriculture Value Chain Development Project (ICARE) Loan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Nomor 9341-ID;
12. Letter No. CD-145/WB/IX/2022 tanggal 5 September 2022 tentang *Declaration of Effectiveness dan No Objection Confirmation* untuk kegiatan ICARE.

2.2. Batasan Pengertian

1. Klinik Modernisasi Pertanian: pusat layanan yang menyediakan konsultasi, edukasi, teknologi, dan pendampingan bagi petani dalam mengadopsi teknologi dan inovasi modern di sektor pertanian dari BRMP
2. Pemangku kepentingan kebijakan: pihak-pihak yang berpengaruh terhadap keputusan atau terpengaruh oleh hasil kebijakan seperti masyarakat umum, organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintah, sektor swasta, atau komunitas lokal
3. Pelaku usaha agribisnis: individu atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi di sektor pertanian secara sistematis dan berorientasi pada keuntungan dalam berbagai tahapan produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran produk pertanian seperti petani, koperasi, UMKM, perusahaan swasta, BUMN, hingga start-up teknologi pertanian.
4. Detasir: Tenaga professional, penyuluh, atau fasilitator yang berperan dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan teknis kepada petani dalam rangka modernisasi pertanian
5. Kolaboratif: pendekatan atau sikap kerja sama yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama secara sinergis.
6. Korporasi petani: bentuk kelembagaan ekonomi berbadan hukum yang dibentuk "*dari, oleh, dan untuk petani*," dengan tujuan meningkatkan skala usaha, efisiensi, dan daya saing mereka di pasar. Konsep ini mendorong petani untuk tidak lagi bekerja secara individual, melainkan secara kolektif dalam satu entitas bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
7. Inklusivitas: keterlibatan integratif petani (*smallholder*) dan usaha agribisnis berskala mikro, kecil dan menengah dalam pengelolaan rantai nilai komoditas pertanian, serta menjamin keterlibatan petani wanita dan petani muda dalam implementasi program ICARE.
8. Kapasitas petani: mencerminkan kemampuan individu maupun kelembagaan petani dalam mengelola usaha tani secara produktif, adaptif, dan berkelanjutan. Ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, serta akses terhadap sumber daya dan teknologi.
9. Inovasi teknologi pertanian: hasil penelitian dan pengembangan teknologi, baik berupa alat, metode, maupun sistem produksi, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam usaha tani.

BAB III. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN KLINIK MODERNISASI PERTANIAN

3.1. Waktu dan Tempat Klinik Modernisasi Pertanian

3.1.1. Waktu

Pelaksanaan Klinik Modernisasi Pertanian (KMP) dimulai bulan Agustus 2025 sampai dengan Desember 2026.

3.1.2. Tempat

KMP berlokasi di Kawasan ICARE yaitu wilayah sekitar lokasi yang sudah intensif didampingi oleh *Project Implementing Unit* (PIU), penentuan lokasi merupakan hasil diskusi dengan PIU, ditempati oleh tenaga detasir lapang atau kunjungan untuk pelatihan dan peninjauan (penyuluh pertanian lapangan/PPL, medik/paramedik veteriner, ASTA, perekayasa, dan tenaga teknis lainnya seperti *site manager* dan fasilitator lapang). Untuk koordinasi pengelolaan KMP dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk, dapat *site manager* atau PPL yang disepakati untuk bertanggungjawab. KMP dapat difungsikan sebagai pusat informasi teknologi dan sistem agribisnis korporasi, tempat peningkatan kapasitas petani, posko tim pelaksana lapang dan tempat pertemuan teknis. Dalam pelaksanaan layanan KMP, akan ada petugas piket terjadwal. Dalam pelaksanaannya dapat melibatkan PPL dan atau petani *champion* setempat yang sudah memahami solusi dari permasalahan petani setempat.

3.2. Target Sasaran Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan KMP menyasar petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani/korporasi petani secara terpilah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Setiap kelompok umur dipastikan terwakili dalam setiap pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sasaran pelaksanaan kegiatan adalah pemangku kepentingan dan/atau pengambil keputusan di lokasi kegiatan. Penentuan target sasaran dilakukan berkoordinasi dengan PIU setempat.

3.3. Jenis Klinik Modernisai Pertanian

Klinik Modernisasi Pertanian terdiri dari 3 jenis, setiap lokasi minimal memiliki 1 jenis KMP. Jenis KMP tersebut adalah:

a. Klinik Tetap

Klinik Tetap merupakan bentuk KMP yang wajib ada, berlokasi di kawasan ICARE terpilih yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang, ruang pertemuan untuk penyediaan layanan, dan teknologi pertanian.

b. Klinik Bergerak

Klinik Bergerak merupakan KMP yang bersifat opsional untuk diadakan. Klinik bergerak menggunakan kendaraan khusus yang membawa teknologi

pertanian ke lokasi yang sukar dijangkau dan melibatkan PPL untuk konsultasi langsung dengan petani.

c. Klinik Digital

Klinik Digital merupakan KMP yang bersifat opsional untuk diadakan. Klinik digital berbasis aplikasi atau *website* yang memungkinkan konsultasi secara daring yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis permasalahan pertanian serta menyediakan forum dan webinar untuk diskusi dan pelatihan jarak jauh.

3.4. Fasilitas Klinik Modernisasi Pertanian

Klinik Modernisasi Pertanian harus memenuhi persyaratan fasilitas standar untuk mendukung pelayanan antara lain tempat/ruang untuk konsultasi/pertemuan, dan lahan untuk percontohan/*display* inovasi teknologi di sekitar KMP. Lahan percontohan/display inovasi disepakati dengan calon petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani yang akan menjadi sasaran KMP.

3.5. Jenis Pelayanan Klinik Modernisasi Pertanian

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh KMP disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan terkait pengembangan rantai nilai komoditas yang akan diselesaikan di masing-masing Lokasi ICARE. Penentuan jenis pelayanan disesuaikan tahapan seperti pada bagian 3.6.a. Adapun jenis-jenis pelayanan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

3.5.1. Sosialisasi dan diseminasi teknologi

a. Penyusunan materi diseminasi teknologi dalam bentuk digital (video, audio) dan cetak (flyer, leaflet, brosur dll.) serta *display* teknologi (*display window of agricultural technology*).
b. Diseminasi teknologi dalam bentuk pertemuan maupun *one on one meeting*.
c. Peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis lainnya melalui bimbingan teknologi bagi: petani, penyuluh, anggota koperasi petani dan stakeholders lainnya tentang penerapan inovasi mulai dari budidaya hingga pascapanen.

3.5.2. Bimbingan teknis dan penyuluhan

a. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan akan melibatkan tim teknis *Project Management Unit* (PMU), pakar dari Eselon 2 BRMP, dan atau penyuluh dari lokasi KMP.
b. Bimbingan teknis memiliki fungsi untuk memperkenalkan teknologi baru yang berfungsi menjawab permasalahan atau mitigasi masalah.
c. Penyuluhan berfungsi untuk melakukan edukasi dan transfer pengetahuan, fasilitasi, dan pendampingan penerapan teknologi.

3.5.3. Pendampingan intensif secara langsung

a. Tim pakar dari unit Eselon 2 BRMP menugaskan tenaga detaser untuk memberikan bimbingan teknis langsung kepada petani untuk secara langsung membantu petani dalam memahami dan menerapkan teknologi yang telah diperkenalkan.
b. Setiap sesi pendampingan mencakup evaluasi penerapan teknologi, pemecahan masalah spesifik di lapangan, serta demonstrasi teknologi pertanian yang relevan dengan komoditas di masing-masing lokasi.
c. Penyediaan sarana dan prasarana memfasilitasi akses terhadap alat dan bahan pertanian yang diperlukan dalam implementasi teknologi.
d. Pendampingan ini juga mencakup pengawalan implementasi inovasi pertanian berbasis kajian ilmiah.

3.5.4. Konsultasi teknis

Penyediaan layanan konsultasi teknis secara daring atau tatap muka untuk mendukung petani dalam memahami dan menerapkan teknologi yang diperkenalkan, Penyelesaian kendala teknis yang dihadapi oleh petani seperti pengendalian hama dan penyakit, peningkatan efisiensi *input*, peningkatan produktivitas, dan penanganan pasca panen.

3.5.5. Implementasi teknologi

a. Implementasi teknologi dari BRMP yang membantu menyelesaikan permasalahan petani/peternak.
b. Layanan pengujian dari persiapan hingga pascapanen. Pengujian tanah, pengujian benih dan bibit, pengujian air, dan pengujian pasca panen.
c. Dukungan pada aplikasi *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Farming Practices* (GFP).

3.6. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Detasir dari Unit Kerja Eseleon II

a. Survei lapangan (*Rapid Rural Appraisal*/RRA)

1) Tujuan: Mengidentifikasi kondisi aktual pertanian di lokasi yang ditargetkan, termasuk tantangan dan potensi yang ada.
2) Kegiatan:
   a. Melakukan kunjungan ke lokasi pertanian untuk mengamati praktik pertanian yang sedang berlangsung.
   b. Mengumpulkan data awal mengenai jenis komoditas, metode budidaya, dan masalah yang dihadapi petani.
   c. Wawancara dengan petani untuk mendapatkan informasi mendalam tentang kebutuhan dan harapan mereka.

b. Pendampingan teknologi

1) Tujuan: Membantu petani dalam mengadopsi teknologi pertanian modern yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
2) Kegiatan:
   a. Menyediakan sesi pendampingan langsung di lapangan untuk demonstrasi penggunaan teknologi baru.
   b. Mengadakan *workshop* dan pelatihan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.

c. Konsultasi, pelatihan, dan demplot kegiatan

1) Tujuan: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui pendidikan dan praktik langsung.
2) Kegiatan:
   a. Mengadakan sesi konsultasi reguler untuk menjawab pertanyaan dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi petani.
   b. Menyelenggarakan pelatihan tentang manajemen pertanian, pengendalian hama dan penyakit serta teknik pemasaran.
   c. Membangun demplot (*demonstration plot)* untuk menunjukkan praktik pertanian terbaik dan hasil dari teknologi yang diterapkan.

d. Perancangan usaha agribisnis

1) Tujuan: Membantu petani merancang usaha agribisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan.
2) Kegiatan:
   a. Mengadakan lokakarya untuk membahas aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha agribisnis, termasuk analisis pasar, perencanaan keuangan, dan manajemen risiko.
   b. Menyediakan akses ke sumber daya dan jaringan yang dapat mendukung pengembangan usaha agribisnis.

e. Monitoring dan pengendalian hama dan penyakit

1) Tujuan: Membantu petani/peternak mengendalikan hama dan penyakit serta mendata keadaan tanaman dan ternak agar dalam keadaan prima.
2) Kegiatan:
   a. Mengadakan pelatihan tentang hama dan penyakit pada tanaman dan ternak.
   b. Memberikan arahan terkait angka ambang ekonomi, serta rekomendasi untuk pengendalian.
   c. Menyediakan akses pada sumber informasi gejala dan serangan hama dan penyakit, serta menyediakan akses pengendalian berupa obat dan *chemical*.

f. Mitigasi

1) Tujuan: Membantu petani/peternak mencegah terjadinya kendala.

2) Kegiatan:
   a. Mengadakan pelatihan tentang manajemen masalah dan *problem solving*.

g. Pencatatan Penerima Layanan Klinik

Setiap sasaran penerima layanan, wajib mengisi form penerima layanan KMP pada tautan berikut: https://s.id/Form_Penerima_Layanan_KMP); dan mengisi survey kepuasan penerima layanan KMP pada tautan berikut: https://bit.ly/SKM_LayananKMP. Format Form Penerima Layanan dan Form Survey Kepuasan seperti pada Lampiran 1 dan 2.

h. Pengelolaan Klinik

Pengelolaan Klinik Modernisasi Pertanian di setiap Lokasi ICARE dilakukan oleh Satuan Kerja Eselon II lingkungan BRMP, dan dikoordinasikan oleh Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Tabel 1. Dukungan Satuan Kerja BRMP dalam Kegiatan KMP

No.	Lokasi	Komoditas	UK Terkait	Koordinator BBPPMP
1	Jawa Barat	Kentang	BRMP Hortikultura, BRMP Pascapanen	Nanik A.P.
		Domba	BRMP PKH BRMP Pascapanen	
2	Jawa Tengah	Padi	BRMP Padi BRMP SDLP	
		Pisang	BRMP Hortikultura	
3	Jawa Timur	Mangga	BRMP Hortikultura BRMP Pascapanen	
		Jagung	BRMP Tanaman Pangan BRMP Pascapanen	
4	Lampung	Kopi	BRMP Perkebunan BRMP SDLP BRMP Mektan	Dwi Purmanto
		Kambing	BRMP PKH	
5	Nusa Tenggara Barat	Ayam	BRMP PKH BRMP Veteriner	
		Jagung	BRMP Tanaman Pangan	

No.	Lokasi	Komoditas	UK Terkait	Koordinator BBPPMP
6	Kalimantan Barat	Jeruk	BRMP Hortikultura BRMP Pascapanen	
		Padi	BRMP Padi BRMP Mektan BRMP Pascapanen	
7	Sulawesi Selatan	Kentang	BRMP Hortikultura BRMP Mektan	Putri N.S.
		Sapi	BRMP PKH BRMP Biogen	
8	Sulawesi Tenggara	Kakao	BRMP Perkebunan	
		Sapi	BRMP Biogen BRMP Veteriner	
9	Sulawesi Utara	Jagung	BRMP Tanaman Pangan BRMP SDLP	
		Kelapa	BRMP Perkebunan	

Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian, menunjuk koordinator KMP pada masing-masing Lokasi ICARE. Adapun tugas koordinator lokasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan PIU terkait dengan lokasi KMP dan target penerima manfaat;
2. Melakukan koordinasi dengan UK lain dalam lokasi yang sama terkait dengan pelaksanaan kegiatan, jadwal kegiatan, dan jumlah penerima manfaat sesuai kategori;
3. Membuat catatan setiap hasil pertemuan/pelaksanaan kegiatan untuk tindak lanjut kegiatan berikutnya;
4. Melalukan kompilasi, dan analisis data terkait capaian target PDO untuk pelaporan kegiatan;

3.7. Mekanisme Penggunaan Anggaran

Satuan kerja pelaksana KMP menyusun serta menyampaikan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan *timeline* pelaksanaan kegiatan sebagai dasar rencana penarikan dana. Pendanaan pada kegiatan KMP meliputi:

1. Belanja bahan

a. Konsumsi makan dan snack dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan peserta dari eselon 1 lain atau luar kementerian pertanian (diluar anggota yang tercantum dalam SK Kegiatan). Dokumentasi pertanggungjawaban yang harus dilengkapi antara lain surat undangan peserta internal maupun eksternal, daftar hadir, kwitansi dan nota pembelian (>Rp5.000.000,- menggunakan materai), NPWP dan notulen kegiatan disertai foto menggunakan *geo tagging*.
b. Fotokopi, penjilidan, cetak yang peruntukannya sebagai media diseminasi. Dokumentasi pertanggungjawaban yang harus dilengkapi antara lain kuitansi dan nota pembelian (>Rp5.000.000,- menggunakan materai).
c. Bahan cetakan untuk media diseminasi. Dokumentasi pertanggungjawaban yang harus dilengkapi antara lain kuitansi dan nota pembelian (>Rp5.000.000,- menggunakan materai), foto gambar bukti barang (menggunakan foto *geo tagging*), foto gambar penyerahan barang (menggunakan foto geo tagging), tanda terima barang.
d. Seminar kit, dokumentasi pertanggungjawaban yang harus dilengkapi antara lain kuitansi dan nota pembelian (>Rp5.000.000,- menggunakan materai), foto gambar bukti barang (menggunakan foto *geo tagging*), foto gambar penyerahan barang (menggunakan foto *geo tagging*), tanda terima barang.
e. Spanduk/banner, dokumentasi pertanggungjawaban yang harus dilengkapi antara lain kuitansi (>Rp5.000.000,- menggunakan materai) dan nota pembelian (ukuran spanduk dicantumkan), dan foto gambar bukti barang (menggunakan foto *geo tagging*).
f. Bahan pendukung praktik penerapan rantai nilai wajib menyertakan data dukung dari 3 toko/*platform*. Dokumentasi pertanggungjawaban yang harus dilengkapi antara lain kuitansi dan nota pembelian (>Rp5.000.000,- menggunakan materai), foto gambar bukti barang (menggunakan *geo tagging*), foto gambar penyerahan barang (menggunakan foto *geo tagging*), tanda terima barang.

2. Upah detasir

Upah detasir dilengkapi dengan SK pemberian upah. Dokumentasi pertanggungjawaban yang harus dilengkapi antara lain SK sebagai dasar hukum pembayaran UHL, surat perjanjian kerja, daftar hadir (daftar nama pekerja, jam masuk, jam pulang), laporan pelaksanaan pekerjaan disertai foto menggunakan *geo tagging* setiap hari dan tanda terima penerima UHL (nama, jumlah hari, upah yang dibayarkan)

3. Belanja barang persediaan berupa ATK, *computer supplies*

Khusus untuk belanja barang persediaan satuan kerja pelaksana KMP menyampaikan RAB yang terdiri dari jenis barang, jumlah dan harga secara detail karena harus dilakukan pencatatan pada aplikasi persediaan di

BBPPMP. Untuk pertanggungjawaban selain dokumentasi pertanggungjawaban yang harus dilengkapi antara lain kuitansi dan nota pembelian (>Rp5.000.000,- menggunakan materai), foto gambar bukti barang (menggunakan *geo tagging*), tanda terima barang juga dilengkapi BAST antara satuan kerja pelaksana KMP dengan BBPPMP.

4. Honorarium narasumber

Honorarium diberikan untuk narasumber yang berasal dari luar Kementerian Pertanian (tidak boleh untuk anggota yang masuk dalam SK Kegiatan). Dokumentasi pertanggungjawaban yang harus dilengkapi antara lain surat undangan dan rundown acara (sudah disertai nama narasumber), kuitansi atau tanda bukti pengeluaran narasumber, CV narasumber yang menyatakan jabatan, surat konfirmasi kesanggupan atau surat tugas narsum dari instansi yang bersangkutan, bahan tayang, daftar hadir narasumber dan peserta, notulen dan foto menggunakan *geo tagging* dan NPWP narasumber.

5. Belanja Perjalanan Dinas

Apabila dilakukan koordinasi dalam kegiatan FGD/bimtek/ sosialisasi/pertemuan, maka uang saku yang dibayarkan sebesar Rp 95.000,- untuk *full day* dan Rp 130.000,- untuk *full board* (menginap). Koordinasi diluar kegiatan FGD/bimtek/ sosialisasi/pertemuan dapat diberikan secara lumpsum sesuai dengan SBM TA 2025. Biaya transportasi dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan bukti pembelian. Biaya penginapan dibayarkan secara *at cost* sesuai dengan bukti pembelian tidak boleh melebihi SBM TA 2025. Dokumentasi pertanggungjawaban yang harus dilengkapi antara lain surat tugas dan lampiran, kuitansi perjadin, bukti pengeluaran penginapan dan transportasi, jika ada pengeluaran transportasi lokal maka lumpsum hanya dibayarkan 60%, SPPD, laporan perjalanan dinas dilengkapi foto menggunakan *geo tagging.*

Untuk penggantian transport peserta FGD/bimtek/ sosialisasi/pertemuan yang harus dilengkapi antara lain surat tugas dan lampiran, surat undangan yang menyatakan konsumsi dan transport dibebankan pada penyelenggara, tanda terima sesuai bukti/*at cost* (ada nomor NIK, kecamatan), fotokopi KTP, SPPD dan laporan kegiatan disertai foto menggunakan *geo tagging*.

3.8. Mekanisme pengajuan anggaran

Ketua tim pelaksana KMP mengajukan kebutuhan anggaran pelaksanaan untuk dilakukan verifikasi kesesuaian penggunaan oleh PPK BBPPMP sebagai dasar persiapan BBPPMP memproses penyediaan anggaran (LS atau GU). Penyerahan dokumen asli surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran seperti yang ditunjukkan pada Lampiran 4, dan *evidence* target PDO disampaikan ke BBPPMP paling lambat minggu keempat. Proses pencairan bulan berikutnya akan diproses jika dokumen asli surat pertanggungjawaban pada bulan sebelumnya sudah rampung dan dinyatakan lengkap oleh tim verifikasi keuangan BBPPMP. Satuan kerja pelaksana KMP menyampaikan laporan keuangan setiap bulan dalam rangka proses rekonsiliasi.

BAB IV. KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

4.1. Koordinasi

Koordinasi dilakukan untuk mewujudkan sinergi antar aktor kunci pada pelaksanaan layanan Klinik Modernisasi Pertanian. Pelaksanaan koordinasi mengacu prinsip:

- **Integratif**: Menghubungkan sumber teknologi yaitu BRMP dengan pengguna akhir yaitu petani dan pelaku usaha di lokasi pengembangan kawasan ICARE.
- **Kolaboratif**: Mengedepankan kerjasama multipihak.
- **Responsif**: Menyediakan layanan konsultasi yang solutif dan berbasis kebutuhan petani dan pelaku usaha di lokasi pengembangan kawasan ICARE.
- **Transformatif**: Mendorong perubahan pola budidaya menuju pertanian modern.

Beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KMP ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Peran Lembaga yang Terlibat dalam Jaringan KMP

No	Aktor	Peran
1	BRMP (Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian)	Sumber teknologi, penyusun paket teknologi, penyedia pelatihan teknis dan materi edukasi
2	Tenaga Detasir Lapang (Penyuluh, Perekayasa, Teknisi, dll.)	Pelaksana layanan konsultasi, edukasi dan demonstrasi teknologi kepada petani
3	Pemangku Kebijakan Pusat	Penyedia dukungan regulasi, koordinasi lintas sektor, dan pembiayaan
4	Dinas Pertanian/Peternakan/terkait komoditas yang dikembangkan	a. Menyiapkan informasi pasar, *supplier* dan permodalan b. Membantu menyiapkan materi penyuluhan c. Advokasi d. Konsultasi pengembangan jaringan usaha
5	Petani dan Pelaku Agribisnis	Penerima manfaat, peserta layanan, dan mitra uji coba/adopsi teknologi

No	Aktor	Peran
6	KMP (Klinik Modernisasi Pertanian)	Wadah interaksi & integrasi layanan teknologi modernisasi pertanian
7	Koperasi/Asosiasi komoditas	a. Menyediakan informasi harga, komoditas, dan pasar b. Konsultasi pengembangan jaringan usaha

Pelaksanaan koordinasi meliputi empat alur utama:

1. Koordinasi Teknis
   Dilakukan oleh BRMP Penerapan bersama Satker lingkup BRMP yanga terlibat dalam pelaksanaan KMP dengan tenaga detasir. Materi koordinasi diantaranya terkait: Penyediaan materi, teknologi, dan pembekalan dan pelatihan teknis, dan capaian output kegiatan pada KMP.
2. Koordinasi Layanan Konsultasi dan Edukasi
   Dilakukan oleh tenaga detasir dan petani / pelaku usaha. Materi koordinasi diantaranya terkait: Konsultasi teknologi, praktik lapangan, pendampingan Monitoring adopsi teknologi.
3. Koordinasi Pendukung Kebijakan dan Anggaran
   Dilakukan oleh Pemangku Kebijakan dengan BRMP dan KMP. Materi koordinasi diantaranya terkait dukungan regulasi, anggaran kegiatan, dan integrasi program, supervisi dan evaluasi.
4. Koordinasi Umpan Balik dan Pembelajaran
   Dilakukan oleh BRMP Penerapan, KMP dan Petani. Materi koordinasi diantaranya terkait data hasil uji lapang, respons adopsi, tantangan teknis Penyempurnaan inovasi teknologi dan metode diseminasi.

4.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menilai pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mengambil pembelajaran khususnya penyelesaian kendala dan masalah dari proses pelaksanaan kegiatan yang berguna sebagai penyempurnaan dan perbaikan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya.

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan beberapa tahap waktu yaitu: 1) awal tahun anggaran (*Pre Evaluation*); 2) pertengahan tahun anggaran (*Mid-Term Evaluation*); dan 3) akhir tahun anggaran (*Post Evaluation*). Materi evaluasi yang disampaikan mencakup aspek administrasi, teknis dan anggaran. Evaluasi dapat menggunakan alat ukur kerangka kerja logis dengan menyampaikan mulai dari masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak yang dihasilkan. Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan apakah kinerja kegiatan menunjukan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator monitoring dan evaluasi KMP, yaitu:

1. Layanan konsultasi: frekuensi konsultasi, jenis materi, jumlah petani dan pelaku rantai nilai komoditas yang terlayani;
2. Adopsi teknologi modern: teknologi yang diterapkan, tingkat adopsi petani sesuai kebutuhan dan kondisi lokal;
3. Kapasitas tenaga teknis lapang: kemampuan tenaga teknis lapang dalam memberikan layanan terpadu kepada petani dan pelaku usaha tani;
4. Ekosistem pelayanan teknis yang terintegrasi dengan kelembagaan korporasi petani dan pelaku rantai nilai di kawasan ICARE.

4.3. Pelaporan

Dalam menjalankan kegiatan KMP Program ICARE, laporan sangat penting karena dapat menjadi salah satu alat yang resmi untuk menyampaikan informasi secara sederhana dan objektif, tentang semua masalah yang relevan dari kegiatan tersebut.

Laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Isi informasi yang disampaikan melalui laporan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mulai dari informasi berita, keterangan, pemberitahuan, hingga pertanggungjawaban.

4.3.1. Waktu pelaporan dan penanggung jawab

Laporan hasil monitoring dan evaluasi akan dilaporkan dan menjadi bahan pertimbangan pimpinan dan manajemen untuk menilai pencapaian kinerja dan pencapaian realisasi penyerapan anggaran. Pelaporan memberikan gambaran tentang:

- Pencapaian target sesuai dengan PDO ICARE
- Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jenis pelayanan KMP (sosialisasi, bimbingan teknis, pendampingan intensif, dll.)
- Rencana kegiatan yang akan dilakukan
- Permasalahan dari aspek teknis dan substansi
- Hambatan yang dihadapi dan strategi keluar yang ditempuh

Adapun pelaporan dilakukan secara berjenjang dilakukan sesuai dengan mekanisme seperti pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan KMP

Tingkat	Periode Pelaporan	Penyampaian Pelaporan	Waktu Penyampaian
9 BRMP dan Puslit/Balai Besar	• Bulanan • Triwulan • Tahunan	PIU BBPPMP	• Bulanan: Sebelum tanggal 4 bulan berikutnya • Triwulan: Sebelum tanggal 6 awal triwulan berikutnya • Tahunan: maksimal tanggal 20 bulan Januari tahun berikutnya

Tingkat	Periode Pelaporan	Penyampaian Pelaporan	Waktu Penyampaian
PIU BBPPMP	• Bulanan • Triwulan • Tahunan	PMU	• Bulanan: Sebelum tanggal 5 bulan berikutnya • Triwulan: Sebelum tanggal 10 awal triwulan berikutnya • Tahunan: maksimal tanggal 30 bulan Januari tahun berikutnya
PMU	• Bulanan • Triwulan • Tahunan	Kepala Badan dan World Bank	• Bulanan: Sebelum tanggal 7 bulan berikutnya • Triwulan: Sebelum tanggal 14 awal triwulan berikutnya • Tahunan: maksimal bulan Februari tahun berikutnya

4.3.2. Laporan Berkala

Laporan berkala adalah laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan secara berjenjang oleh penanggung jawab kegiatan mulai dari penanggung jawab ICARE di 9 BRMP/Puslit/BB, PIU BBPPMP dan PMU.

Laporan bulanan merupakan laporan pelaksanaan kegiatan yang disusun per bulan sebagai bahan evaluasi kinerja berdasarkan *output* kegiatan. Laporan disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan kepada pimpinan secara berjenjang setiap awal bulan. Format laporan bulanan terdapat pada Lampiran 2.

Laporan triwulan merupakan laporan pelaksanaan kegiatan per triwulan (3 bulan) sebagai bahan evaluasi kinerja berdasarkan capaian *output* kegiatan. Laporan disampaikan secara berjenjang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah triwulan berakhir. Format laporan triwulan terdapat pada Lampiran 3.

Laporan tahunan/laporan akhir disusun setiap awal tahun. Laporan tahunan ini disusun sebagai dokumentasi profil dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Format laporan tahunan terdapat pada Lampiran 4. Penulisan laporan menggunakan bahasa semi populer dan dicetak serta dibagikan ke setiap instansi terkait serta pengguna lainnya.

BAB V. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KLINIK MODERNISASI PERTANIAN

Keberhasilan Klinik Modernisasi Pertanian (KMP) dalam mendukung pengembangan kawasan ICARE tidak terlepas dari sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Unit Eselon 2 lingkup BRMP yang akan melakukan pendampingan sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing komoditas. Indikator kinerja kegiatan KMP digunakan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Indikator kinerja dari KMP ini disusun agar jelas, terukur, serta mudah diimplementasikan oleh pelaksana dalam pencapaian target serta pelaksanaan di lapangan.

5.1. Indikator Kinerja Klinik Modernisasi Pertanian

5.1.1. Indikator utama (*output dan outcome*)

1. Jumlah petani yang terlayani
   a. Target jumlah petani yang mendapatkan layanan KMP.
   b. Data penerima layanan mencakup informasi jenis kelamin, usia, keanggotaan kelompok tani, pemuda tani, dan pihak lain yang mendukung kegiatan KMP.
2. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan
   a. Jumlah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, demonstrasi lapang, dan pendampingan teknologi yang terlaksana sesuai rencana kerja.
3. Penerapan teknologi pertanian modern
   a. Jenis teknologi pertanian modern yang disampaikan kepada petani dan pemangku kepentingan.
   b. Jumlah teknologi pertanian modern yang disampaikan kepada petani dan pemangku kepentingan.
4. Kualitas layanan
   a. Jumlah dan jenis layanan konsultasi teknis yang diberikan, baik secara tatap muka maupun daring.
   b. Tingkat kepuasan petani terhadap layanan KMP berdasarkan hasil form evaluasi kepuasan layanan.

5.1.2. Indikator pendukung (proses dan manajemen)

1. Ketersediaan fasilitas KMP
   a. KMP memiliki sarana yang memadai, minimal memiliki seperti ruang konsultasi/pertemuan dan *display* teknologi.
2. Kehadiran dan peran tenaga pendamping
   a. Jumlah tenaga pendamping lapangan (BRMP, PIU, penyuluh, pakar) yang aktif memberikan layanan sesuai jadwal.
3. Kelengkapan administrasi dan pelaporan

a. Tersusunnya laporan kegiatan, dokumentasi (foto/video), daftar hadir (dengan data gender), serta laporan keuangan tepat waktu.

4. Efektivitas koordinasi
   a. Tingkat keterlibatan satuan kerja, PIU, PMU, dan pemangku kepentingan lokal dalam mendukung kegiatan KMP.

5.1.3. Metode pengukuran

1. Formulir data penerima layanan digunakan untuk mengetahui jumlah dan profil petani penerima manfaat, mencakup informasi jenis kelamin, usia, dan keanggotaan kelompok tani atau pihak terkait lainnya.
2. Formulir evaluasi digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan layanan dan peningkatan kapasitas petani setelah menerima layanan KMP.
3. Laporan kegiatan disusun untuk mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan, meliputi jenis kegiatan, materi yang disampaikan, serta jumlah dan profil peserta.
4. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh tim pusat maupun daerah untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan target serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

5.1.4. Target kinerja

1. Petani terlayani: jumlah petani yang mendapatkan layanan KMP sesuai atau melebihi target *Project Development Objective* (PDO) BRMP.
2. Kegiatan utama: setiap lokasi KMP melaksanakan minimal 1 kegiatan sosialisasi, satu bimbingan teknis, dan satu pendampingan teknologi dalam setiap periode pelaksanaan.
3. Kepuasan layanan: minimal 80% peserta menyatakan puas terhadap layanan KMP berdasarkan hasil evaluasi kepuasan dan adanya peningkatan pengetahuan petani.

5.2. Strategi Unit Eselon II BRMP dalam Mencapai Target PDO

Strategi Unit Eselon II BRMP dalam mencapai target PDO ditunjukkan pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Strategi Unit Eselon UK dan Eselon II BRMP dalam Mencapai Target PDO

No	Strategi	Kegiatan
1	Perencanaan & penetapan lokasi yang tepat	a. Melakukan survei lapang (RRA) untuk mengidentifikasi kebutuhan petani, potensi komoditas unggulan, dan masalah spesifik lokasi. b. Menentukan lokasi KMP yang terletak di wilayah sekitar lokasi yang sudah intensif didampingi oleh PIU, strategis, mudah diakses petani, dan mendapat dukungan pemangku kepentingan lokal. c. Menyusun rencana kerja dan pembagian target ke setiap UPT.
2	Optimalisasi layanan Klinik Modernisasi Pertanian (KMP)	a. Mengoperasikan KMP Tetap sebagai pusat utama dengan fasilitas lengkap untuk konsultasi, pelatihan, dan *display* teknologi. b. Sarana yang minimal terpenuhi yaitu tempat/ruang untuk konsultasi/pertemuan dan display teknologi. c. Menjalankan KMP Bergerak untuk menjangkau wilayah terpencil dengan kendaraan dan tenaga penyuluh. d. Mengembangkan KMP Digital untuk konsultasi *online*, webinar, dan forum diskusi jarak jauh.
3	Diseminasi & edukasi teknologi	a. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang inovasi pertanian dari budidaya hingga pascapanen. b. Membuat demonstrasi lapangan (demplot) untuk memperlihatkan hasil nyata penerapan teknologi. c. Menyediakan materi edukasi dalam bentuk digital, cetak, dan audiovisual yang mudah dipahami petani.
4	Pendampingan intensif & berkelanjutan	d. BRMP dan pakar dari Eselon II melakukan kunjungan lapang rutin (setiap 2 minggu sekali). e. Fokus pada pemecahan masalah spesifik yang dihadapi petani. f. Menetapkan detasir (tenaga pendamping khusus) di setiap wilayah unit kerja Eselon II.
5	Penguatan koordinasi & kolaborasi	a. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja, PIU, PMU, dan dinas pertanian daerah. b. Melibatkan kelompok tani, penyuluh lokal, dan sektor swasta dalam teknologi, pasar, dan permodalan. c. Memanfaatkan pendampingan virtual (daring) untuk efisiensi koordinasi.

No	Strategi	Kegiatan
6	Efisiensi & transparansi pengelolaan anggaran	a. Menyusun RAB dan *timeline* kegiatan yang realistis sesuai kebutuhan lapang. b. Menerapkan pencairan sesuai termin (2 termin). c. Pencairan tahap selanjutnya baru diberikan setelah SPJ rampung tahap sebelumnya disertai dengan bukti capaian PDO terpenuhi.

5.3. Target PDO Kegiatan Klinik Modernisasi Pertanian Tahun 2025 s/d 2027

Target PDO pada kegiatan Klinik Modernisasi Pertanian Tahun 2025 s/d 2027 ditunjukkan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Target PDO Kegiatan KMP Tahun 2025

No	Indikator	Target PDO
I	**Petani yang dijangkau oleh aset atau layanan pertanian**	90.000
a.	Petani yang dijangkau dengan aset atau layanan pertanian – Perempuan	22.500
b.	Petani yang dijangkau dengan aset atau layanan pertanian – Pemuda	30.000
c.	Lainnya	37.500
II	**Sebaran PDO**	
1	Lampung	7.200
2	Jawa Barat	10.800
3	Jawa Tengah	10.800
4	Jawa Timur	10.800
5	Kalimantan Barat	10.800
6	NTB	10.800
7	Sulawesi Selatan	10.800
8	Sulawesi Tenggara	7.200
9	Sulawesi Utara	10.800
10	Pusat Perakitan dan Modernisasi Tanaman Pangan	900
11	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan	900
12	Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura	1.500
13	Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan	600
14	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	600
15	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	900
16	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	300
17	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	900
18	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	900
19	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	600

BAB IV. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Klinik Modernisasi Pertanian (KMP) ini disusun sebagai pedoman operasional dan teknis yang komprehensif dalam upaya mewujudkan transformasi pertanian modern di lokasi program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE). Dokumen ini menguraikan secara rinci tujuan, sasaran, ruang lingkup, prosedur pelaksanaan, hingga mekanisme anggaran dan indikator kinerja KMP, yang semuanya dirancang untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani melalui adopsi teknologi dan inovasi.

Keberhasilan implementasi KMP sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi aktif dari berbagai pihak terkait, termasuk Satuan Kerja Eselon II lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), tenaga teknis dan pendamping lapangan, petani anggota korporasi petani, serta pelaku usaha dalam rantai nilai komoditas pertanian. Melalui panduan ini, diharapkan setiap tahapan kegiatan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga KMP mampu berfungsi optimal sebagai pusat layanan konsultasi, edukasi, teknologi, dan pendampingan bagi petani.

Dengan komitmen bersama dan penerapan petunjuk pelaksanaan ini secara konsisten, KMP diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama modernisasi pertanian yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata dalam mencapai target-target Program ICARE demi terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Data Penerima Layanan

Formulir Data Penerima Layanan

No	Jenis Data		Isian
1	Nama	:	
2	Jenis Kelamin	:	
3	Umur	:	
4	NIK	:	
5	Alamat		
	Dusun	:	
	Desa	:	
	Kecamatan	:	
	Kabupaten	:	
	Propinsi	:	
6	Jenis layanan yang diterima		Silahkan di lingkari a. Sosialisasi/pertemuan b. Bimbingan teknologi c. Demonstrasi plot di lahan d. Pendampingan intensif oleh tenaga detaser (pegawai yang ditugaskan secara khusus) e. Konsultasi teknis f. Fasilitasi Rancangan Usaha Bisnis petani
7	Teknologi		
	Komoditas	:	☐ Padi ☐ Jagung ☐ Kentang ☐ Jeruk ☐ Pisang ☐ Kopi ☐ Kakao ☐ Kelapa ☐ Ayam ☐ Kambing ☐ Domba ☐ Sapi
	Komponen teknologi	:	
8	Petugas pemberi layanan	:	

https://s.id/Form_Penerima_Layanan_KMP

Lampiran 2. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan KMP

Scan barcode berikut ini untuk mengisi formulir survei kepuasan masyarakat penerima layanan KMP

https://bit.ly/SKM_LayananKMP

Lampiran 3. Format laporan berkala (bulanan)

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Gambaran Umum Kegiatan

Uraian dengan deskripsi .....
.....

1.2. Tujuan

Uraian dengan deskripsi .....
.....

1.3. Sasaran

Uraian dengan deskripsi .....
.....

1.4. Keluaran

Uraian dengan deskripsi .....
.....

(Insert "Page break")

BAB 2. HASIL KEGIATAN/CAPAIAN KINERJA

Uraian dengan deskripsi .....
.....

(Insert "Page break")

BAB 3. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Uraian dengan deskripsi .....
.....

Lampiran 4. Format laporan berkala (triwulan)

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Gambaran Umum Kegiatan

Uraian dengan deskripsi.....
.....

1.2. Tujuan

Uraian dengan deskripsi.....
.....

1.3. Sasaran

Uraian dengan deskripsi.....
.....

1.4. Keluaran

Uraian dengan deskripsi.....
.....

(Insert "Page break")

BAB 2. HASIL KEGIATAN/CAPAIAN KINERJA

Uraian dengan deskripsi.....
.....

(Insert "Page break")

BAB 3. HASIL KEGIATAN/CAPAIAN KINERJA

Uraian dengan deskripsi.....
.....

(Insert "Page break")

BAB 4. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Uraian dengan deskripsi.....
.....

(Insert "Page break")

BAB 5. TINDAK LANJUT PERMASALAHAN BULAN SEBELUMNYA

Uraian dengan deskripsi.....
.....

Lampiran 5. Format laporan berkala (tahunan)

KATA PENGANTAR

Uraian dengan deskripsi .....
.....

(Insert "Page break")

RINGKASAN

Uraian dengan deskripsi .....
.....

(Insert "Page break")

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN 28
1.1 Latar Belakang dan Gambaran Umum Kegiatan ..... Error! Bookmark not defined.
1.2 Tujuan ..... Error! Bookmark not defined.
1.3 Sasaran ..... Error! Bookmark not defined.
1.4 Keluaran ..... Error! Bookmark not defined.
BAB 2. HASIL KEGIATAN/CAPAIAN KINERJA 28
BAB 3. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN 28
BAB 4. TINDAK LANJUT PERMASALAHAN BULAN SEBELUMNYA 28

(Insert "Page break")

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Gambaran Umum Kegiatan

Uraian dengan deskripsi .....
.....

1.2. Tujuan

Uraian dengan deskripsi .....
.....

1.3. Sasaran

Uraian dengan deskripsi .....
.....

1.4. Keluaran

Uraian dengan deskripsi .....
.....

(Insert "Page break")

BAB 2. HASIL KEGIATAN/CAPAIAN KINERJA

Uraian dengan deskripsi .....
.....

(Insert "Page break")

BAB 3. PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Uraian dengan deskripsi .....
.....

(Insert "Page break")

BAB 4. TINDAK LANJUT PERMASALAHAN BULAN SEBELUMNYA

Uraian dengan deskripsi .....
.....

Lampiran 6. Formulir Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Jumlah petani peserta dan frekuensi kegiatan

UK	Lokasi	Jumlah Peserta		Frekuensi Kegiatan					
		L	P	Sosialisasi	Bimtek	Demplot	Pendampingan intensif	Konsultasi Teknis	Implementasi Teknologi

Lampiran 7. Penerapan teknologi pertanian modern

UK	Lokasi	No	Jenis Teknologi[a]	Jumlah[b]
		1		
		2		
		3		

Keterangan:

a: Jenis teknologi pertanian modern yang disampaikan kepada petani dan pemangku kepentingan.

b: Jumlah teknologi pertanian modern yang disampaikan kepada petani dan pemangku kepentingan.

Lampiran 7. Formulir pertanggungjawaban keuangan

Scan barcode berikut ini untuk mengunduh template formulir pertanggungjawaban keuangan.

https://bit.ly/KelengkapanSPJ-KMP2025

icare

INTEGRATED CORPORATION OF AGRICULTURAL RESOURCES EMPOWERMENT

AGRO MODERN

PETUNJUK PELAKSANAAN
KLINIK MODERNISASI PERTANIAN PROGRAM ICARE
TAHUN 2025